

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGUATAN CIVIC SKILL PADA MASYARAKAT DESA WARGASALUYU

Fadli Desri Yadi¹, Asep Deni Normansyah², Cep Miftah Khoerudin³

^{1,2,3}Universitas Pasundan

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Korespondensi: Email :

desriyadifadli11@gmail.com,

asepdeninormansyah@unpas.ac.id

cep miftahkhoerudin@unpas.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

This study aims to determine the role of a village head in increasing the participation and skills of the Wargasaluyu Village community through village government programs. This study focuses on the community as socio-political groups in which the discourse of autonomy and the ability to be critical and the implementation of mutual cooperation values develop. The research method uses a case study research method. In a study, the presence of researchers is a very important tool, researchers in conducting research can also act as observers who participate, in this case researchers in the field must be directly involved and in contact with the research object. Therefore, when collecting data in the field, a researcher must participate in the research object and can actively participate in activities in the field and by using a case study research method. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. This study also confirms that the Village Head in practice has a very important role in increasing community participation through village government programs in order to realize shared prosperity. Data analysis, namely qualitative data through case studies, the results of the study show several programs designed to increase the participation and skills of village communities, namely (1) Implementation of village government programs in increasing participation, skills, and attitudes of responsibility of village communities; (2) the obstacles faced by village heads and village governments in increasing village community participation, namely limited facilities and infrastructure and limited funds in realizing village government programs; (3) efforts made to overcome these obstacles include using a persuasive approach in creating programs and involving village communities in village deliberations.

Keywords: *Village Head, Mutual Cooperation, Village Government Program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran seorang kepala desa dalam meningkatkan partisipasi dan keterampilan masyarakat Desa Wargasaluyu melalui program pemerintah desa. Penelitian ini berfokus kepada masyarakat sebagai kelompok-kelompok sosial politik yang dimana didalamnya berkembang wacana otonomi dan kemampuan untuk bersikap kritis serta implementasi nilai-nilai gotong royong. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Dalam sebuah penelitian, kehadiran peneliti merupakan sebagai alat yang sangat penting, peneliti dalam melakukan penelitian juga dapat bertindak sebagai pengamat yang ikut berpartisipasi, dalam hal ini peneliti di lapangan harus terlibat langsung dan bersentuhan dengan objek penelitian. Oleh karena itu pada saat melakukan pengumpulan data di lapangan, seorang peneliti harus berperan serta pada objek penelitian dan dapat mengikuti

secara aktif kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan serta dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Kepala Desa dalam praktiknya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pemerintah desa demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Analisis data yaitu data kualitatif secara studi kasus, maka hasil penelitian menunjukkan beberapa program yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan keterampilan masyarakat desa yaitu (1) Implementasi program pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan sikap tanggung jawab masyarakat desa; (2) kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa yaitu keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan dana dalam realisasi program pemerintah desa; (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut melakukan pendekatan persuasif dalam membuat program dan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah desa.

Kata Kunci: Kepala Desa, Gotong Royong, Program Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa, sebagai badan kekuasaan terendah, memiliki kewenangan asli dan pelimpahan dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan aparatur pemerintah yang tangguh, profesional, dan mampu mengelola sumber daya manusia di daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang otonom merupakan langkah strategis dalam mempercepat pelayanan publik dan mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.

Pemerintah desa dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus mengutamakan kemitraan yang baik antar aparatur desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD), dengan memahami tugas dan wewenangnya masing-masing. Kolaborasi yang sinergis dan profesional di antara mereka diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Kepala desa, sebagai pemimpin, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuannya adalah mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera dengan memperkuat kapasitas masyarakat dan melaksanakan pembangunan berbasis adat istiadat setempat.

Kepala desa memiliki wewenang penting dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan, membina masyarakat, serta mengembangkan perekonomian desa untuk kesejahteraan bersama. Kepemimpinan yang efektif memerlukan hubungan yang erat dan saling melengkapi antara pemimpin dan rakyat, seperti hubungan patronase. Pemimpin ideal adalah mereka yang tergerak oleh panggilan untuk melayani, bukan karena ambisi pribadi. Pemahaman yang mendalam tentang hakikat kepemimpinan dalam pemerintahan desa harus diwujudkan dalam kebijakan yang jelas dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang berfokus pada pengembangan kemampuan individu dan sosial, termasuk kreativitas, kompetensi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Di Indonesia, pembangunan desa menjadi dasar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembangunan desa melibatkan baik sumber daya lokal maupun bantuan pemerintah, bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Pertambahan jumlah desa setiap tahun menunjukkan pentingnya pembangunan yang merata, khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas hidup dan infrastruktur.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program prioritas seperti PRUKADES, EMBUNG DESA, BUMDes, dan RAGA DESA untuk mendukung pembangunan desa yang merata. Namun, keterbatasan dana dan sumber daya manusia sering menjadi kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kepala desa memiliki peran penting dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera.

Pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang ada pada setiap individu. Partisipasi masyarakat tidak hanya membantu pelaksanaan pembangunan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk secara aktif berperan dalam perubahan menuju masyarakat madani. Tesyalom Sembel et al. (2017) mengutip dari Sastrosapoetro menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti pemikiran, keterampilan, tenaga, harta benda, dan materi. Partisipasi ini penting karena sasaran utama pembangunan adalah manusia, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan akan mendorong terwujudnya kesadaran kolektif dalam memajukan desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga erat kaitannya dengan pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) yang merupakan salah satu kompetensi penting dalam membentuk warga negara yang baik. Somantri dalam Wahab dan Sapriya (2011) menyebutkan bahwa sifat-sifat patriotik, toleran, religius, demokratis, dan Pancasila adalah kualitas warga negara yang baik. Keterampilan kewarganegaraan ini dapat diasah dalam lingkungan sosial desa dan mencakup kemampuan memahami sistem politik, membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi efektif, serta mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini penting dalam menciptakan warga negara yang aktif dan berperan dalam pembangunan demokrasi yang sehat (Winarno, 2019).

Keterampilan partisipasi sangat penting bagi warga desa, karena tidak hanya berkaitan dengan isu politik, tetapi juga mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, bekerja sama, mengatasi konflik, dan memenuhi kesepakatan secara damai dan adil. Soft skills ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemimpin dan motivator harus berperan aktif dalam mensosialisasikan program pemerintah desa, membangun kedekatan emosional dengan warga, serta mengintegrasikan nilai-nilai partisipasi untuk memperkuat civic skills. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran kepala desa dalam penguatan civic skills di Desa Wargasaluyu.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian merupakan upaya peneliti dalam memastikan sudut pandang yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan penjelasan yang luas dan mendalam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Strauss dan Corbin adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan tanpa menggunakan statistik atau pengukuran. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, tingkah laku, dan aktivitas sosial. Adapun menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati, memberikan uraian mendalam dalam konteks tertentu tanpa menggunakan teknik statistik.

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk memahami fenomena penerapan pendidikan karakter dalam mengatasi krisis moral peserta didik secara lebih holistik. Peneliti membutuhkan interaksi intensif dengan subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna menggali informasi secara mendalam.

Adapun metode yang digunakan adalah studi kasus (case study), yang memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap objek penelitian sebagai kasus. Metode ini dipilih karena mampu mendeskripsikan fenomena dalam konteks dunia nyata secara utuh, dengan teknik pengumpulan data yang beragam seperti dokumen, wawancara, dan observasi, serta fokus pada pertanyaan "how" untuk menyelidiki kondisi yang terjadi, seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat desa dan kurangnya infrastruktur.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara rinci dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Wargaaluyu mengenai penerapan program pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku masyarakat dan pejabat desa dalam pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Selain itu, studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen tertulis seperti RPJMDes, profil desa, dan laporan lain yang relevan sebagai data pendukung penelitian. Adapun triangulasi dilakukan untuk memvalidasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang terkumpul. Teknik ini bertujuan memastikan keakuratan dan keabsahan data dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses sistematis untuk menyusun dan memahami data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan informasi dalam bentuk kalimat, memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi nilai karakter religius di masyarakat. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. tahap reduksi data mencakup pemilihan dan pengelompokan informasi ke dalam kategori tertentu, membantu peneliti fokus pada tujuan penelitian. Penyajian data melibatkan penyusunan informasi dalam bentuk naratif, gambar, tabel, atau grafik, memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian, mengandalkan bukti yang valid dan konsisten untuk menyampaikan hasil penelitian tentang peran Kepala Desa dalam penguatan civic skill pada masyarakat Desa Wargaaluyu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Wargasaluyu dalam mensosialisasikan dan menguatkan program pemerintah desa

Proses pemerintahan desa, khususnya di Desa Wargasaluyu, sangat bergantung pada keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh kepala desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat demi mendukung pembangunan desa. Kualitas kepemimpinan yang baik sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif di antara warga, sehingga kepala desa perlu mampu memanfaatkan potensi masyarakat dan menggerakkan energi komunitas untuk mencapai tujuan pemerintahan. Program-program seperti Jum'at Bersih dan pengelolaan air bersih dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Desa.

Keberhasilan kepala desa dalam mengelola program-program tersebut tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat, baik dari kalangan muda maupun tua. Dalam hal ini, kepala desa berperan penting dalam memotivasi aparatur desa dan menciptakan ruang komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah desa. Melalui koordinasi yang baik dan dukungan dari kepala dusun, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Dengan cara ini, kepala desa tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya, tetapi juga membangun iklim gotong royong yang selaras dengan harapan dan cita-cita Desa Wargasaluyu.

Kendala yang dihadapi kepala desa dalam merealisasikan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Wargasaluyu

Kendala dalam merealisasikan program kerja desa sering kali menghambat partisipasi masyarakat. Hambatan ini dapat muncul dari berbagai aspek, baik dalam aktivitas maupun komunikasi. Dalam konteks aktivitas, faktor seperti kurangnya motivasi, ketidakberminatannya, dan minimnya dukungan lingkungan dapat menjadi penghalang. Sedangkan dalam komunikasi, gangguan mekanis, perbedaan bahasa atau budaya, dan kesulitan dalam memahami pesan yang disampaikan dapat mengurangi efektivitas interaksi. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar perencanaan program kerja dapat berjalan lancar dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail Saleh, kepala desa Wargasaluyu, dan Ibu S.I, KASI Pelayanan, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Proses pengajuan anggaran untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana desa seringkali berjalan lambat, sehingga menghambat pelaksanaan program-program yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Contohnya, meskipun bendungan sumber air desa telah diperbaiki, masalah lain seperti ketidakstabilan air saat hujan tetap muncul, yang berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat.

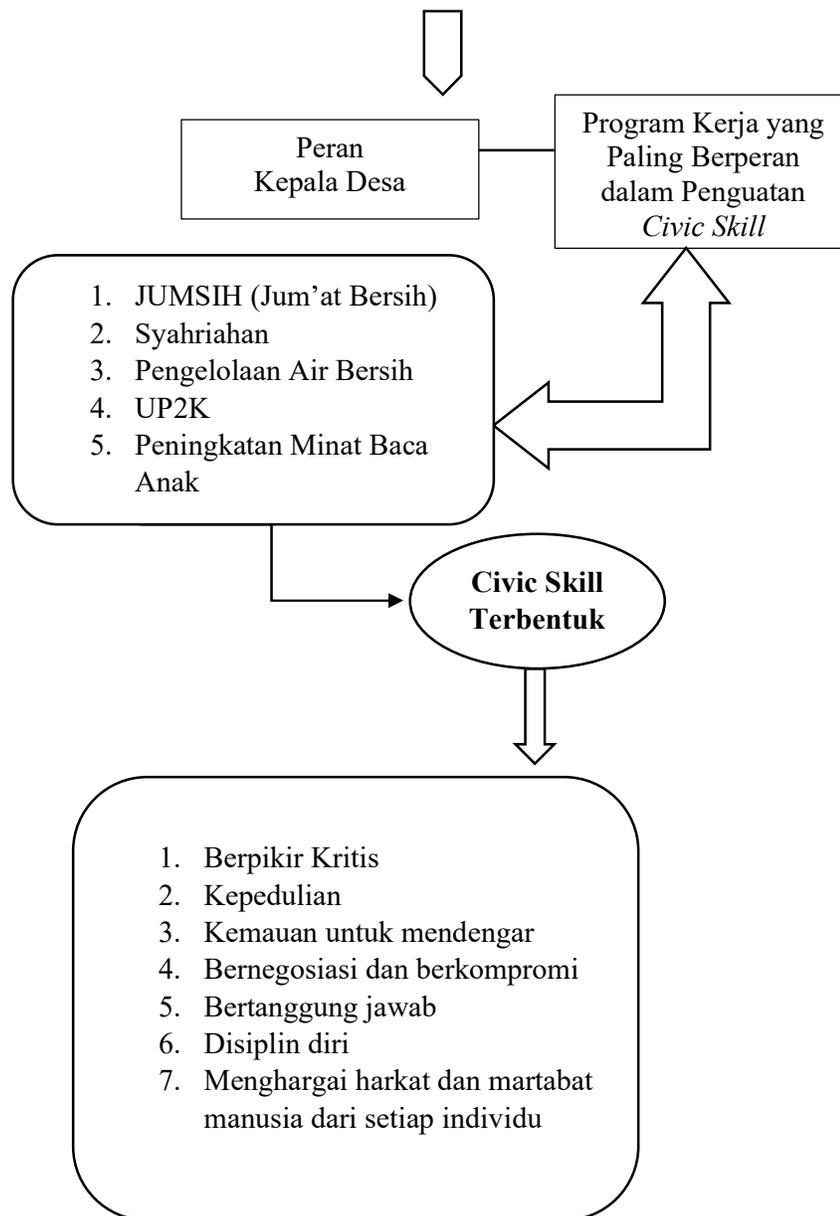
Selain itu, masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa juga signifikan. Menurut Ibu Ai Syifa, masyarakat mengalami kesulitan modal, yang menghambat usaha mereka. Terbatasnya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM, yang sebagian besar merupakan kalangan dewasa. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk mereka. Masyarakat desa berharap mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar lebih mampu menjalankan usaha dan mengatasi masalah yang ada.

Solusi kepala desa dalam mengatasi permasalahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wargaaluyu

Solusi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam konteks kepemimpinan desa, kepala desa harus mampu menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Branson (1998) dalam Winarno (2012, hlm. 150), pendekatan interaktif dengan masyarakat adalah penting, termasuk monitoring kondisi desa dan memotivasi masyarakat agar terlibat dalam program-program pemerintah. Kepala desa tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugasnya; dukungan dari rekan-rekan di pemerintah desa juga sangat diperlukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail Saleh dan Ibu Ai Syifa M., kepala desa Wargaaluyu mengatasi permasalahan yang menghambat rutinitas dengan melakukan rapat evaluasi mingguan untuk membahas program-program yang telah dilaksanakan. Selain itu, untuk menarik minat partisipasi, terutama di kalangan muda, kepala desa mengajukan kolaborasi dengan mahasiswa dari LLDIKTI IV untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pada tahun 2023, desa ini melaksanakan program inovatif, termasuk pelatihan fotografi dan seminar tentang fakta nutrisi, guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat tentang pemasaran produk UMKM.

Dalam mengatasi hambatan pendanaan untuk pelaku UMKM, desa telah menyediakan koperasi dengan pinjaman tanpa bunga, membantu pengusaha yang ingin mengembangkan usaha mereka. Untuk masalah sarana dan prasarana, terutama pengelolaan air bersih, kolaborasi dengan mahasiswa menghasilkan solusi berupa bak penampungan air dengan metode filterisasi yang menjaga konsistensi kualitas air. Dengan pendekatan persuasif dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi, kepala desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan oleh Talizidihu Ndraha (1990, hlm. 103-104).



Berdasarkan kerangka hasil penelitian, peran Kepala Desa Wargasaluyu dalam penguatan Civic Skill melalui program kerja pemerintah desa terbukti efektif. Program-program tersebut, seperti JUMSIH (Jum'at Bersih), Syahriahan, pengelolaan air bersih, UP2K, dan peningkatan minat baca, dirancang berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Masing-masing program memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan visi misi Desa Wargasaluyu, seperti meningkatkan literasi dan peka terhadap isu global, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Output yang diharapkan dari program-program ini adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis di kalangan masyarakat dalam menghadapi masalah dan mencari solusi. Selain itu, ada peningkatan sikap kepedulian dan tanggung jawab di masyarakat, yang tercermin dalam slogan desa GESIT (Gotong Royong Membangun Desa Wargasaluyu Yang Jujur, Adil, Sejahtera,

Berbudaya dan Berakhlak Mulia). Forum komunikasi yang diadakan pemerintah desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk bernegosiasi dan merencanakan program, menunjukkan komitmen mereka terhadap kedisiplinan dan menghargai satu sama lain. Antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi semakin meningkat, membuktikan efektivitas program yang dijalankan.

SIMPULAN

Bahwa kesimpulan dari penelitian mengenai peran Kepala Desa dalam penguatan Civic Skill di Desa Wargasaluyu menunjukkan bahwa kepala desa telah berhasil mensosialisasikan program pemerintah dengan penuh tanggung jawab dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Program-program seperti JUMSIH, Syahriaan, pengelolaan air bersih, UP2K, dan peningkatan minat baca dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menanamkan nilai gotong royong sesuai dengan visi misi desa.

Meskipun ada tantangan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta keterampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha mikro, kepala desa tetap berupaya mengatasi hambatan ini melalui evaluasi rutin dan kolaborasi dengan mahasiswa untuk inovasi. Hasil penelitian menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi, yang tercermin dalam indikator Civic Skill seperti berpikir kritis dan kepedulian, serta keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- B.S .Muljana. (2001). *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI-Press.
- Culla, A. S. (2002). *Masyarakat madani: pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendi, B. (2002). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset. PT. Uhindo dan Offset.
- Herdiawanto, H., Wasitaatmadja, F. F., & Hamdayama, J. (2019). *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Isbandi, R. A. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Madjid, N. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Riwu Kaho, J. (2017). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



- Setiadi. (2013). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Universitas Malang: Brawijaya Press.
- Ubaedillah, A. (2000). *Pendidikan kewarganegaraan pancasila, demokrasi, ham dan masyarakat madani*. Jakarta: Indonesian Center For Civic Education (ICCE).
- V. Wiratna Sujarweni (2023). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru
- Winarno (2019). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan isi, strategi, dan penilaian*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Jurnal dan Skripsi

- Nutvi, A (2021). *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa di Desa Lebani Suko Wringinanom.*, eprints.ubhara.ac.id.
- Akbal, M. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Prosiding Seminar Nasional, 2, 487.
- Awang, A. (2010). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pemerintah Desa Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. *Jurnal Kybernologi Indonesia*, 1(1), 12.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Nainggolan, H. E. (2017). *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan*.
- Ramadhan, M. H. (2021). *Analog Switch Off Dalam Perspektif Regulator*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Singsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*. *Jurnal Eksekutif*, 1(01).
- Tyas, T. A. Y. B. (2019). *Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang)*.
- Yoga Yogi Swara (2022). *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan Desa Menuju Masyarakat Madani*. Universitas Pasundan Bandung.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

SUMBER LAINNYA

- Rancangan Program Jangka Menengah Desa Wargasaluyu
Depdikbud. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.